



DPM-PTSP.

KOTA BANDA ACEH

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh



LAPORAN PENYELENGGARAAN PTSP TRIWULAN II

TAHUN 2026

Lampiran I
Surat Nomor :
Tanggal : 15 Juli 2026

Laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah TW II

I. Identitas dan Alamat Penyelenggara Perizinan Berusaha di Daerah :

Nama Dinas : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kota Banda Aceh

No.	Nama Kepala Dinas	No. HP Kepala Dinas	Alamat Kantor	No. Telp Kantor	Email Kantor
1	Mohd Ichsan, S.STP., M.Si	081362433009	Gedung Pasar Atjeh Baru Lt. 3 Jl. Diponegoro - Banda Aceh - 23242	(0651) 32874	dpmptsp.bna@gmail.com website : dpmptsp.bandaacehkota.go.id Media Sosial (IG) : • mpp_kotabandaaceh • dpmptsp_bandaaceh

II. Peraturan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

No.	Uraian	Nomor	Tahun	Yang menandatangani	Nama Peraturan
1.	Perda Pembentukan Kelembagaan DPMPTSP	Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11	2016	Plt. Walikota Banda Aceh Hasanuddin	Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh
2.	Perkada Tugas Fungsi DPMPTSP	Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56	2016	Plt. Walikota Banda Aceh Hasanuddin	Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh
3.	Perkada Pendelegasian Wewenang Perizinan Berusaha	Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24	2022	Pj. Walikota Banda Aceh Dr.H. Bakri Siddiq, SE.M.Si	Pendelegasian, Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan NonPerizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh
4.	Perkada Standar Operasional Prosedur (SOP)	Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 613	2022	Pj. Walikota Banda Aceh Dr.H. Bakri Siddiq, SE.M.Si	Standar Operasional Prosedur Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh

5.	Perkada Maklumat Pelayanan	Keputusan Kepala DPMPTSP Nomor 518	2017	Plt. Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh Muchlish, SH	Penetapan Visi, Misi, Motto, Janji Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh
6.	Perkada Pendelegasian Wewenang	Peraturan Walikota Nomor 24	2022	Pj. Walikota Banda Aceh Dr.H. Bakri Siddiq, SE.M.Si	Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh
7.	Perkada Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Perizinan Berusaha	Keputusan Walikota Nomor. 97	2023	Pj. Walikota Banda Aceh Dr.H. Bakri Siddiq, SE.M.Si	Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berdasarkan Resiko Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh
8	Perkada Pembentukan Tim Penerbitan Perizinan	Keputusan Walikota Nomor. 390	2023	Pj. Walikota Banda Aceh Amiruddin, SE.M.Si	Pembentukan Tim Penerbitan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh
9	Perkada Tim Pengelola MPP	Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor : 545	2023	Pj. Walikota Banda Aceh Amiruddin, SE.M.Si	Pembentukan Tim Pengelola MPP Kota Banda Aceh
10	Perkada Standar Operasional Prosedur (SOP)	Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor : 7	2024	Pj. Walikota Banda Aceh Amiruddin, SE.M.Si	Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh
11	Perkada Pembentukan Tim Monitoring Mal Pelayanan Publik (MPP)	Keputusan Walikota Nomor 216	2024	Pj. Walikota Banda Aceh Amiruddin, SE.M.Si	Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh
12	Perkada Mal Pelayanan Publik (MPP)	Peraturan Walikota Nomor 38	2024	Pj. Walikota Banda Aceh Ade Surya, ST.ME	Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh

13	Perkada Standar Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh	Keputusan Walikota Nomor 22	2025	Pj. Walikota Banda Aceh Almuniza Kamal, S.STP, M.Si	Standar Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh
14	Perkada Standar Pelayanan Mal Pelayanan Publik	Keputusan Walikota Nomor 30	2025	Pj. Walikota Banda Aceh Almuniza Kamal, S.STP, M.Si	Standar Pelayanan pada Mal Pelayanan Publik
15	Perkada Tugas Fungsi DPMPTSP	Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 39	2025	Walikota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal, SE	Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh

III. SDM Penyelenggara (Lampirkan Struktur Organisasi)

Jenis Kelamin	Pendidikan									
	ASN					Tenaga Kontrak				
	SMU	D-3	D4	S1	S2	SMU	D-3	D-4	S1	S2
Laki-Laki	5	1	3	12	3	-	-	-	-	-
Perempuan	3	2	3	17	4	-	-	-	-	-
Jumlah	8	3	6	29	7	-	-	-	-	-

IV. Sarana dan Prasarana (hanya dilampirkan jika ada tambahan)

NO	SARANA & PRASARANA	KETERSEDIAAN		
		ADA	BELUM	
1.	Kantor depan (<i>Front Office</i>)	√		
	a. Loker penerimaan	√		
	b. Loker penyerahan	√		
	c. Loker pembayaran	√		
	d. Ruang/tempat layanan informasi	√		
	e. Ruang/tempat layanan pengaduan	√		
	f. Ruang/layanan konsultasi	√		
2.	Kantor belakang (<i>Back Office</i>)	√		
	Ruang rapat	√		
	Ruan pemrosesan	√		

3.	Ruang pendukung	√		
	a. Ruang tunggu	√		
	b. Ruang laktasi	√		
	c. Ruang difabel dan manula	√		
	d. Ruang bermain anak	√		
	e. Ruang arsip dan perpustakaan	√		
	f. Toilet/kamar mandi	√		
	g. Tempat ibadah	√		
	h. Tempat parkir	√		
	i. Ruang/tempat penjualan makanan dan minuman	√		
4.	Alat/fasilitas pendukung	√		
	a. Seragam pelayanan	√		
	b. Formulir	√		
	c. Telepon dan mesin faksimile	√		
	d. Perangkat komputer, printer, dan scanner	√		
	e. Mesin antrian	√		
	f. Alat pengukur kepuasan layanan	√		
	g. Kolak pengaduan	√		
	h. Mesin foto kopi	√		
	i. Kamera pengawas (CCTV)	√		
	j. Koneksi internet	√		
	k. Laman/website dan e-mail	√		
	l. Alat penyedia daya listrik atau UPS	√		
	m. Alat pemadam kebakaran	√		
	n. Pendingin ruangan	√		
	o. Televisi	√		
	p. Brosur	√		
	q. Banner	√		
	r. Petunjuk arah lokasi	√		

V. Jumlah Laporan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan (Lampirkan Laporan Rekapitulasi Perizinan Berusaha dan Nonperizinan TW II)

No.	Jumlah Izin Yang Diterbitkan TW II			
	Melalui OSS	SiCantik/MPPD	Melalui APLIKASI LAIN (SIMBG)	MANUAL (Izin Pendidikan)
1	4773	SiCantik : 56 MPPD : 612	132	18

VI. Jumlah Rencana dan Realisasi Investasi

No.	Jumlah Rencana Investasi TW II 2026	Jumlah Realisasi Investasi TW II 2026	Keterangan
	Rp. 157.659.767.529,-	Rp. 309.399.370.755,-	Data sementara (belum pers release BKPM)

VII. Survei Kepuasan Masyarakat

No.	Periode SKM	Jumlah Responden	Nilai IKM
1.	Semester I	254	94,32
2.	Semester II	254	-

VIII. Mekanisme Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Uraikan Mekanisme/SOP Pengaduan (lengkap dengan alamat pengaduan)		Keterangan
online	offline	Sebutkan Nomor Peraturan SOP Pengaduan
Telepon : 0651-32874 Whatshaap : 08116833155 Email : dpmptsp.bna@gmail.com Website : dpmptsp.bandaacehkota.go.id Media Sosial (IG): - mpp_kotabandaaceh - dpmptsp_bandaaceh	Menyampaikan secara langsung pada konter layanan pengaduan DPMPTSP di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Banda Aceh yang beralamat : Jl. Diponegoro, Pasar Aceh Baru Lt. 3 Banda Aceh	Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor : 12 Tahun 2010 Tentang Mekanisme Penanganan Pengaduan Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu Kota Banda Aceh

IX. Penyuluhan Perizinan Berusaha di Daerah

Kegiatan Penyuluhan e-perizinan yang dilakukan	Jumlah	Keterangan
-	-	-

X. Penyederhanaan Jenis dan Prosedur Perizinan Berusaha di Daerah

No.	Jenis Penyederhanaan	Sebelum	Saat Ini
1	Online Single Submission (OSS)	OSS	OSS RBA

XI. Pemberian Insentif dan Kemudahan

Peraturan tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Nomor	Tanggal	Keterangan
Qanun Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	-	-	Menunggu Pengesahan DPRK

XII. Inovasi Layanan

No.	Uraian Inovasi	Rencana	Realisasi
1	Pelayanan Publik berbasis elektronik yang mengintegrasikan berbagai layanan elektronik (<i>e-services</i>)	MPP Digital	Telah diterbitkan 6.010 Surat Izin Praktek (SIP) dari 9.385 permohonan
2.	Sistem Informasi MPP	Sistem Informasi MPP	Pembangunan Sistem Informasi MPP berbasis web

XIII. Kendala dan Solusi Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

No.	Kendala	Solusi	Keterangan
1.	Terkait Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang perizinan berusaha dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 28 Tahun 2025, dimana data di OSS belum tersinkronisasi dengan RDTR	Revisi RDTR Kota Banda Aceh	Sudah melakukan konsultasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan mendapatkan 300 kbli prioritas, sebelum dilaksanakannya revisi RDTR.
2.	Tidak adanya lagi personil helpdesk OSS yang dibiayai oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.	Difasilitasi Kembali oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.	Mengingat OSS merupakan sistem perizinan satu pintu berskala nasional yang dikelola terpusat oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, maka keberadaan <i>helpdesk</i> yang kompeten dan terstandarisasi di tingkat daerah mutlak diperlukan sebagai perpanjangan tangan pusat guna meminimalisir kendala sistemis di lapangan

Banda Aceh, 15 Juli 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Banda Aceh



MOHD IHSAN, S.STP., M.Si

Penyuluh Utama Muda

NIP. 197803231996121001